

FAIRPLAY NASIONAL DAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Ayi Karyanya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka
ayi@ut.ac.id

ABSTRAK

Dalam praktik, kebijakan nasional oleh konstituen daerah-daerah tertentu dianggap menjadi penghambat dalam memajukan daerahnya, konstituen daerah tersebut menganggap bahwa kebijakan nasional telah menimbulkan ketidakseimbangan pembagian porsi dalam hubungan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Kebijakan nasional sampai sekarang dinilai masih terlalu berat sebelah dan masih mencerminkan otokrasi sentral. Pengalaman menunjukkan, apabila hubungannya terfokus pada aspek politik semata, maka yang terjadi adalah timbulnya konflik yang mengancam pada disintegrasi bangsa. Peran lokal dalam pembangunan demokrasi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun sistem pemerintahan nasional. Dalam melaksanakan hak-hak otonom sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah sentral, peran lokal akan dapat menampung pluralisme yang ada dalam ruang lingkup nasional, mendorong partisipasi masyarakat dan memberikan pilihan bagi warga untuk berkiprah dalam pembangunan daerah masing-masing. Hakikat kebijakan nasional merupakan suatu keputusan untuk mengatasi berbagai permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, dilakukan oleh suatu lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan demokrasi. Pengkajian dan analisa ilmiah tentang political fairplay nasional dan lokal dalam pembangunan demokrasi perlu dikembangkan agar terjadi sinkronisasi yang sinergis, tidak terjadi perbenturan atau konflik dalam pembuatan kebijakan antara penyelenggara Negara, baik di tingkat sentral maupun lokal.

Kata Kunci: peran lokal, otokrasi sentral, pembagian kekuasaan

PENDAHULUAN

Upaya untuk mengaktualisasikan demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia melalui pendidikan kelihatannya masih harus menempuh jalan panjang. Pendidikan harus melakukan reorientasi dan berusaha menerapkan paradigma baru pendidikan nasional, yang tujuan akhirnya adalah pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis dan berpegang teguh pada nilai-nilai *civility* (keadaan). Masyarakat madani merupakan format kehidupan alternatif yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini diberlakukan ketika Negara sebagai penguasa dan pemerintah tidak bisa menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia dalam menjalankan roda pemerintahannya. Di sinilah kemudian, konsep masyarakat madani menjadi alternatif pemecahan, dengan pemberdayaan dan pengembangan daya kontak masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada dasarnya nanti terwujud kekuatan masyarakat sipil yang mampu merealisasikan dan menegakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia.

Sosok masyarakat madani bagaikan barang antik yang memiliki daya tarik amat memesona. Kehadirannya yang mampu menyemarakkan wacana politik kontemporer dan meniupkan arah baru pemikiran politik, bukan dikarenakan kondisi barangnya yang sama sekali baru, melainkan disebabkan tersedianya momentum kondusif bagi pengembangan masyarakat yang lebih baik.

Masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis, dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Dalam hal ini, pemerintah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreativitas warga Negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang terbentuk begitu saja. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan memerlukan perjuangan yang terus-menerus.

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan system pemerintahan Negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui system pemilihan umum akan

memiliki legitimasi yang kuat. Pemilihan Umum bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan dan untuk membentuk pemerintahan. Pemilu yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan Negara. Oleh karena itu , Pemilihan Umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

A. KAJIAN PUSTAKA

Masyarakat Madani Indonesia

Masyarakat madani masih merupakan sebuah proses dalam rangka reformasi. Masyarakat madani adalah masyarakat yang mampu mengisi ruang publik sehingga dapat menjadi bumper kekuasaan Negara yang berlebihan. Dalam pemikiran reformasi, masyarakat madani merupakan tujuan dan pemerintah demokrasi.

Masyarakat madani merupakan konsep yang memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Merujuk pada Bahmuller (1997), ada beberapa karakter atau ciri-ciri dari masyarakat madani, yaitu sebagai berikut:

- a. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
- b. Menyebarkan kekuasaan, sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif
- c. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh Negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
- d. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan Negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
- e. Tumbuh kembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter.

- f. Meluasnya kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*), sehingga individu-individu mengakui keterlibatan dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga social dengan berbagai ragam perspektif. (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_16.html).

Dari berbagai ciri tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis, dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarkan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Namun demikian masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, *taken for granted*. Masyarakat madani adalah konsep yang cair yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan perjuangannya terus menerus.

Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya *democratic governance* (pemerintah demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan *democratic civilian* (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai *civil security; civil responsibility* dan *civil resilience*). Apabila diuraikan, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat madani, yaitu :

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
- b. Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
- c. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- d. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dikembangkan.

- e. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
- f. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
- g. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya. (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_16.html)

Tanpa prasyarat tersebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat "sipilisme" yang sempit yang tidak ubahnya dengan paham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia.

Berbicara mengenai kemungkinan berlembaganya masyarakat madani di Indonesia diawali dengan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengencangan kebebasan berpendapat, berserikat dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di muka umum kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai kekuatan dan bagian dari *social control*.

Sejak zaman orde baru dengan rezim demokrasi terpimpinnya Soekarno, sudah terjadi manipulasi peran serta masyarakat untuk kepentingan politisi dan terhegemoni sebagai alat legitimasi politik. Hal ini pada akhirnya melibatkan kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat diwarnai sebagai kontra-revolusi. Fenomena tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa di Indonesia pada masa Soekarno pun mengalami kecenderungan untuk membatasi gerak dan kebebasan publik dalam mengeluarkan pendapat.

Sampai pada masa orde baru pun tekanan demokrasi dan penindasan hak asasi manusia tersebut luas bahkan seakan menjadi tontonan gratis yang bias dinikmati oleh siapa pun bahkan untuk

segala usia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai contoh kasus pada masa orde baru berkembang. Misalnya kasus pembredelan lembaga pers, Seperti AJI, DETIK, dan TEMPO. Fenomena ini merupakan sebuah fregmentasi kehidupan yang mengekang kebebasan warga Negara dalam menyalurkan aspirasinya di muka umum, apalagi pada lembaga pers yang notabene memiliki fingsi sebagai bagian dari *social control* dalam menganalisa dan menyosialisasikan berbagai kebijakan yang betul-betul merugikan masyarakat. Di sisi lain, pada era orde baru banyak terjadi tindakan-tindakan anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Hal ini salah satu indikasi bahwa di Indonesia pada saat itu tidak dan belum menyadari pentingnya toleransi dan semangat pluralisme.

Melihat itu semua, maka secara esensial Indonesia memang membutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat, secara komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Untuk itu, maka diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayaan sekaligus agar proses pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasilnya secara optimal.

Dalam hal ini menurut Dewan ada 3 (tiga) strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani di Indonesia, yaitu :

- a. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan karena pembangunan lebih-lebih yang terbuka terhadap perekonomian global membutuhkan risiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari demokrasi.
- b. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap

pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratis yang pada esensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol terhadap Negara.

- c. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas. (<http://jariksumut.wordpress.com/2007/08/31/membentuk> masyarakat madani yang demokratis, harmonis, dan partisipatif).

Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia adalah :

- a. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
- b. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
- c. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
- d. Tingginya lapangan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas

Menerapkan Budaya Demokrasi

Tantangan masa depan demokrasi di Indonesia adalah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai madani. Dalam kaitan ini, menurut Nurcholis, mewujudkan beberapa titik penting pandangan demokratis yang harus menjadi pandangan hidup bagi masyarakat yang ingin mewujudkan cita-cita demokrasi dalam wadah yang disebut masyarakat madani, *civil society*. Pandangan-pandangan tersebut diringkas sebagai berikut :

- a. Pentingnya kesadaran kemajuan atau pluralism
- b. Berpegang teguh pada prinsip musyawarah
- c. Menghindari bentuk-bentuk monolitisme dan absolutisme kekuasaan

- d. Meyakini dengan tulus bahwa kemufakatan merupakan hasil akhir musyawarah
- e. Memiliki perencanaan yang matang dalam memenuhi *basic needs* yang sesuai dengan cara-cara demokratis.
- f. kerja sama dan sikap antar warga masyarakat yang saling mempercayai itikad baik masing-masing
- g. Pendidikan demokrasi yang *lived* ini dalam system pendidikan
- h. Demokrasi merupakan proses *trial and error* yang akan menghantarkan pada kedewasaan dan kematangan. (<http://jariksumut.wordpress.com/2007/08/31/membentuk-masyarakat> madani yang demokratis, harmonis dan partisipatif).

Dengan demikian, untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara menuju peradaban baru Indonesia, negeri adil terbuka, maka demokrasi tersebut harus dibangun dengan seefektif mungkin. Dalam masyarakat madani, warga Negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat *non-govermental* untuk mencapai kebaikan bersama (*public good*) karena pada independensinya terhadap Negara (*vis a vis the state*). Dari sinilah kemudian masyarakat madani dipahami sebagai akar dan awal keterkaitannya dengan demokrasi dan demokratisasi madani juga dipahami sebagai sebuah tatanan kehidupan yang menginginkan kesejahteraan hubungan antara membangun hubungan yang konsultatif bukan konfrontatif antara warga Negara dengan Negara.

Negara Indonesia adalah Negara yang menerapkan demokrasi Pancasila. Artinya perilaku budaya demokrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Perilaku budaya demokrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Perilaku budaya demokrasi dapat diwujudkan dalam berbagai lingkungan kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat ataupun negara. Adapun contohnya sebagai berikut:

- 1. Lingkungan keluarga
 - a. Sebagai kepala keluarga seorang ayah selalu berusaha bersikap adil kepada semua anggota keluarga.

- b. Terbinanya sikap saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antar anggota keluarganya
 - c. Semua anggota keluarga melaksanakan kewajiban dengan baik dan bertanggung jawab.
 - d. Memecahkan masalah keluarga dengan musyawarah
2. Lingkungan sekolah
 - a. Ikut serta dalam kegiatan OSIS, PMR, Pramuka dan lain-lain
 - b. Menghormati Kepala Sekolah , Guru dan karyawan
 - c. Mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan tertib
 - d. Menaati tata tertib sekolah
3. Lingkungan masyarakat dan Negara
 - a. Melaksanakan peraturan yang berlaku, baik peraturan pemerintah pusat, daerah, maupun peraturan terendah
 - b. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan
 - c. Ikut serta dalam pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat
 - d. Ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa
 - e. Membantu korban bencana alam (<http://budaya-masyarakat-madani.blogspot.com/>).

DAFTAR PUSTAKA

Azizi, AQodri Abdillah. 2000. *Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta* : Kajian Historis-Normatif. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani: Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Habibie, B.J.1999. Keppres No. 198 Tahun 1998 Tanggal 27 Februari 1999, Jakarta.

Hamim, Thoha, 2000. *Islam dan Civil society* (Masyarakat Madani): Tinjauan tentang Prinsip Human Rights, Pluralism dan Religious Tolerance, Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani: Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF. 1998. *Pasing Over: Melintas Batas Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal.xiv

Ismail SM. 2000. *Signifikansi Peran Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat Madani*. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani: Yogyakarta : Pustaka Pelajar

<http://budaya-masyarakat-madani.blogspot.com/>).

[http://jariksumut.wordpress.com/2007/08/31/membentuk-masyarakat-madani yang demokratis,harmonis dan partisipatif](http://jariksumut.wordpress.com/2007/08/31/membentuk-masyarakat-madani-yang-demokratis-harmonis-dan-partisipatif)

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_16.html